

# LSM Temukan Dugaan Politisasi PIP

POLEWALI, RADAR SULBAR. -- Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) temukan dugaan politisasi bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Polewali Mandar.

Tiga LSM tersebut yakni Lembaga Penyalur Aspirasi (LPA), Gerakan Indonesia Anti Korupsi (Gerak) dan LP5S. Ketiga lembaga tersebut mengungkapkan bahwa salah satu sekolah di Kecamatan Polewali ditemukan adanya dugaan politisasi bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu atau PIP.

"Hasil investigasi kami di salah satu sekolah dasar ada 17 nama yang tadinya tercoret sebagai saat diusulkan oleh pihak sekolah. Tetapi kemudian 17 anak ini kemudian dapat bantuan setelah diurus oleh salah seorang timses anggota DPR RI," ungkap Ketua LPA Agussalam.

Menurutnya hasil investigasi yang mereka lakukan perlu diketahui oleh masyarakat luas agar program PIP tepat sasaran dan tidak dipolitisasi.

Agussalam menyebutkan, setidaknya ada enam kriteria yang diatur dalam aturan yang boleh menerima bantuan beasiswa ini diantaranya anak kurang mampu, rentan miskin dan disabilitas.

Senada, Ketua LP5S Jupri mengatakan, politisasi program PIP ini dapat menciderai pendidikan



ARIF BUDIANTO/RADAR SULBAR

KONFRENSI PERS. Tiga LSM saat melakukan konferensi pers terkait dugaan politisasi program bantuan beasiswa PIP di Cafe Batistuta Manding Senin 19 Agustus 2024.

dan membuat masyarakat kecewa karena banyak yang dimin-tai data tetapi hanya sedikit yang dapat bantuan tersebut.

"Bentuk politisasinya adalah salah satu tim sukses dari oknum DPR RI ini adalah orangnya yang mengambil daftar 17 orang siswa tersebut. Kemudian diusulkan melalui anggota DPR RI," jelas Jupri.

Ketiganya mengungkapkan akan segera melaporkan dugaan politisasi program bantuan ini kepada Aparat Penegak Hukum.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Dikbud Polman Nurman

menjelaskan bahwa program PIP-KIP ada dua jalur di Kementerian yakni didaftarkan melalui pengusulan di Dapodik dan pengusulan melalui aspirasi Anggota Komisi X DPR RI.

"Untuk jalur aspirasi Dikbud akan melakukan verifikasi agar program ini tepat sasaran," terang Nurman.

Selama ini program PIP aspirasi itu mengcover semua siswa jadi terkadang semuanya siswa dapat bahkan ada anak dari ASN, TNI polri, pejabat pun biasa menerima sehingga itu yang perlu dirampingkan biar penerima tepat sasaran. (arf/mkb)